



LKJIP BAPPEDA 2025

Lampung Barat



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Tulip No. 01 Way Mengaku, Liwa

Telepon/Faxs : (0728) 21156

Laman : lampungbaratkab.go.id Pos-el : bappeda.lampungbarat@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050/ 319 /IV.03/2026

Yth : Bupati Lampung Barat
Melalui Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
D a r i : Kepala Bappeda Lampung Barat
Tanggal : 9 Maret 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Penyampaian Softfile Dokumen LKJIP Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dengan ini Kami sampaikan Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	1 (Satu) Dokumen	Softfile

Demikian disampaikan, terimakasih.

Liwa, 9 Maret 2026

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat,


ERIC ENRICO, S.Hut., MT
PEMBINA TK I
NIP. 197205051999031005

diterima Tanggal. 11/03/2026

Yang Menerima



Uun Nuraini, S.A.N



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP juga merupakan tindak lanjut penerapan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang didalamnya mencakup sebuah kinerja yang direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam rencana strategis organisasi, Rencana Kinerja, dan program kerja tahunan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditujukan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kabupaten Lampung Barat yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan hasil yang baik. Namun terdapat capaian kinerja yang belum memenuhi target kinerja, Yaitu pada komponen Perencanaan kinerja. Hal ini dikarenakan sasaran dan indikator PK telah dilakukan perbaikan yang berorientasi hasil dan SMART namun belum secara merata selain itu terdapat OPD yang rumusan sasaran atau indikatornya belum menjawab isu Strategis secara komprehensif penetapan target kinerja tahunan belum secara merata diterapkan diseluruh OPD. Pohon Kinerja OPD namun ada beberapa OPD yang belum cukup mengeksplorasi *intermediet outcome*, serta penjenjangan kinerja belum sepenuhnya berkualitas. Keberhasilan capaian IKU Bappeda Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Bappeda Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.



Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Maret 2026

PIL. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ERIC ENRICO S.Hut., MT
PEMBINA TK,
NIP. 197205051999031005



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka sejalan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian tujuan, kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target.



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

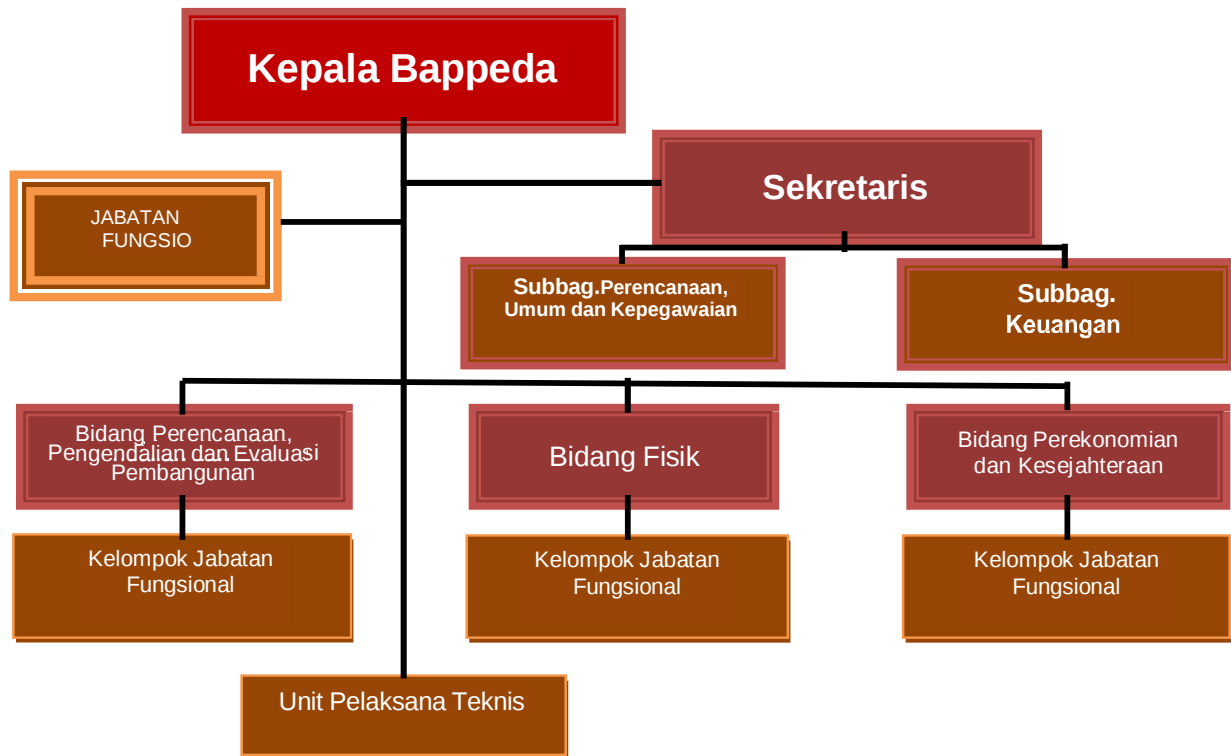
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Penelaah Teknis Kebijakan
- 4) Pengelola Data dan Informasi
- 5) Administrasi Perkantoran



- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - 1)Fungsional Perencana ahli Muda
 - 2)Analisis Kebijakan ahli Muda
 - 3)Penelaah Teknis Kebijakan
- d. Bidang Fisik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1)Fungsional Perencana ahli Muda
 - 2)Analisis Kebijakan ahli Muda
 - 3)Penelaah Teknis Kebijakan
- e. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok
 - 1)Fungsional Perencana ahli Muda
 - 2)Analisis Kebijakan ahli Muda
 - 3)Penelaah Teknis Kebijakan
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

4. Peran Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Nomor 24 Tahun 2023, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda juga merupakan unsur Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah di bidang perencanaan daerah. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



5. Isu Strategis

1. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Perencana untuk mewujudkan kualitas para perencana teknokratik dan memantapkan kelembagaan Bappeda selaku institusi perencanaan.
2. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
3. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran, untuk menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di semua sektor (kewilayahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan data dan informasi).
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terimplementasi sesuai dengan rencana peruntukannya.
6. Mendorong meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kebutuhan akan ruang yang lebih manusiawi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023- 2026 dengan melibatkan para *stake holder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Forum SKPD, sehingga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan *stake holder*.



Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Strategi Bappeda Lampung Barat Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi BAPPEDA Lampung Barat

Guna tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan upaya-upaya atau langkah-langkah kerja yang bersifat strategis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal guna mengantisipasi resiko gagalnya fungsi dan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapaitujuan dan pemenuhan target sasaran dalam menunjang pencapaian tujuan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembat dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan , dilakukan melalui strategi :
 - 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah;
 - 2) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan antar Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan BAPPEDA Lampung Barat

Arah kebijakan merupakan logical framework yang memberikan panduan dari langkah strategis yang telah dirumuskan agar target kinerja dari tiap sasaran yang menjadi indikator kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan. Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat 2023-2026, sebagai berikut: Arah Kebijakan dari sasaran Strategi :

- a. Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah, arah kebijakannya sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Evaluasi dokumen Sesuai aturan yang berlaku.



b. Arah Kebijakan dari sasaran Strategi :

Meningkatkan Koordinasi Perencanaan antar Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan Koordinasi secara Berkala dan Periodik.

Guna mencapai target sasaran dari Rencana Strategisnya, Bappeda Lampung Barat merumuskan 2 (Dua) upaya strategi dengan 2 arah kebijakan, serta didukung kedalam 2 (Dua) Program Strategis.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan proses yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam konteks tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan perencanaan, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta kebijakan nasional dan provinsi. Melalui perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, Bappeda berupaya menghadirkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda mencakup penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penguatan sistem informasi perencanaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi daerah.

Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta dukungan sumber daya yang memadai, Bappeda bertekad mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong



pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut program dan kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat:

Table 2.1
Program dan kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Target
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	83,04 Persentase
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	28 dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen



		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312	orang/ bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan



		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	2	laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	dokumen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	laporan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	laporan



		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	laporan
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	dokumen
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	laporan
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	dokumen
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	unit



		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00 paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 1,00 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00 dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00 dokumen
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0,00 orang
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0,00 laporan
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0,00 orang
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	3 paket



LKJIP 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00	dokumen
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00	Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	Laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	dokumen



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	unit
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00	unit
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	unit
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	Unit
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0,00	Unit



		Bangunan Lainnya	Disediakan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 sub organisasi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratOI	1,00 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	13 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11,00 unit



		Operasional atau Lapangan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0,00 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0,00 unit
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00 unit
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,00 Ha



		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja	1	Persentase
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan	5	dokumen
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0,00	Dokumen
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0,00	Dokumen
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	Berita acara
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1,00	Berita acara
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0,00	Usulan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	Dokumen



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen analisis data ... yang disusun	0 0
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0,00 Masukan
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50,00 Orang
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100,00 Buku
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0 0
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3,00 Laporan
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0,00 Kerjasama
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4,00 Laporan



		Daerah		
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	0 0
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0,00 Dokumen
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0,00 Dokumen
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00 Dokumen
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Bidang Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	1 Persentase
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0 0



		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,00 Dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10,00 perangkat Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10,00 laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2,00 laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	3,00 dokumen



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

		RPJMD dan RKPD)	RKPD)		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5,00	Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5,00	Perangkat Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3,00	laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0	0	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,00	dokumen



		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1,00 laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3,00 perangkat daerah



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1,00 laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	0 0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1,00 laporan



		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3,00	perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3,00	perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1,00	laporan

4. Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai uraian ringkas



yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam IKU Pemerintah Daerah tersebut memuat 6 tujuan dengan 31 Sasaran, dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 52 Indikator Sasaran.

Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (IKU OPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari IKU Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKU OPD selanjutnya menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dan Jajarannya sebagai komitmen OPD dalam mencapai target sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA memuat 1 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda sebagaimana terlampir didalam dokumen RENSTRA BAPPEDA Tahun 2023-2026.



Tabel 2.2
IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	Point	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh KemenPANRB	22,05	22,55	23,05	23,55	24,05	Nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah dalam satu tahun penilaian. Nilai ini mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang dinilai berdasarkan komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Satuan Pengukuran Nilai / skor (0–100) Metode Perhitungan Menggunakan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun berjalan. Frekuensi Pengukuran Tahunan Interpretasi Nilai Kategori nilai SAKIP biasanya terdiri dari: • AA (Sangat Memuaskan) • A (Memuaskan) • BB (Sangat Baik) • B (Baik) • CC (Cukup) • C (Kurang)
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP				20,40	20,90	21,40	21,90	22,40	



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat



Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana pembangunan Daerah (RPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	21,55
		Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	19,90



Kerangka pendanaan Bappeda disusun sebagai gambaran kapasitas fiskal daerah yang menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas. Penyusunan ini memperhatikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga setiap perencanaan program tidak hanya aspiratif tetapi juga feasible secara anggaran. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), informasi kerangka pendanaan menjadi bagian penting yang menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja. Hal ini mencerminkan komitmen Bappeda dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis daerah.

Melalui penyajian informasi kerangka pendanaan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsistensi antara rencana, dukungan anggaran, dan realisasi kinerja, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada periode selanjutnya.

Tabel 2.4
Kerangka pendanaan perangkat daerah

Uraian	Plafon Anggaran		Berkurang /Bertambah
	APBD MURNI 2025	APBD PERUBAHAN 2025	
6	7		8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.591.552.466	3.638.619.977	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	54.258.200	85.822.200	



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.982.000	63.796.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.881.200	1.881.200	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.570.000	1.570.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.809.200	1.809.200	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.073.800	2.073.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.530.000	1.530.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.412.000	13.162.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.007.337.621	2.945.074.512	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.003.020.421	2.940.757.332	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.637.400	1.637.400	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.679.800	1.679.800	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.507.800	4.507.800	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.698.000	2.698.000	
Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.809.800	1.809.800	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.469.000	32.330.400	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi	8.963.000	11.797.400	
Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja	4.843.000	4.843.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.690.000	15.690.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.633.545	204.136.745	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.742.000	3.742.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.912.500	16.912.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.459.600	34.459.600	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.550.000	11.550.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	10.510.720	14.943.920	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.458.725	120.458.725	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.200.000	102.300.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.200.000	102.300.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.716.600	76.018.600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.600.000	26.600.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.116.600	46.418.600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.429.700	188.429.700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	87.950.000	87.950.000	



Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000	40.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.979.700	59.979.700	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.123.301.225	1.180.457.275	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	855.821.225	881.321.275	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.555.575	45.555.575	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	120.826.500	137.826.500	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	294.952.200	294.952.200	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	394.952.200	402.987.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.145.000	70.170.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.585.000	27.610.000	



Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	42.560.000	42.560.000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.335.000	228.966.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	73.991.000	82.607.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.344.000	146.359.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	965.431.600	1.037.182.600	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	452.285.500	484.516.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.739.500	28.739.500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	62.242.500	51.692.500	



Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	67.375.500	83.494.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.195.000	25.195.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.582.000	15.582.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	253.151.000	279.813.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	278.554.600	318.074.600	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.434.500	22.434.500	



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.146.500	18.146.500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	130.575.500	170.095.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.718.700	44.718.700	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.927.000	21.927.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	40.752.400	40.752.400	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	234.591.500	234.591.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.541.000	53.541.000	



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.374.000	6.374.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	49.842.500	49.842.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.732.000	52.732.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.934.000	12.934.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.168.000	59.168.000	



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

1. Analisis Sumber Daya Manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat tercatat sebanyak 44 orang dengan rincian 27 Aparatur Sipil Negera dan 5 orang PPPK Penuh Waktu, 11 orang PPPK Paruh Waktu. sehingga total sumber daya manusia dilingkungan Bappeda Kabupaten Lampung Barat berjumlah 44 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Persentase
1	PNS	27	62%
2	PPPK penuh waktu	5	12%
4	PPPK paruh waktu	11	26%
4	Jumlah	44	100%

Sumber : Bappeda 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat golongan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Keadaan ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	21	75%
2	Perempuan	23	25%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Bappeda 2025



Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	2%
2	S2	9	20%
3	S1	16	37%
4	SLTA	16	37%
5	SLPTP	1	2%
6	SD	1	2%
	JUMLAH	44	100%

Sumber : Bappeda 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

No.	Pangkat, Golongan	Jumlah	Persentas
1.	Pembina Utama Muda, IV/c Pembina Tingkat I, IV/b Pembina , IV/a Jumlah	0 3 3	 5%
2.	Penata Tingkat I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a Jumlah	7 3 7 5 22	 50%
3.	Pengatur Tingkat I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengatur Muda, II/a Jumlah	1 2 1 - 4	 10%
4.	P3K Penuh Waktu P3K Paruh Waktu	5 11	 35%
	JUMLAH (1+2+3+4)	44	100%

Sumber : Bappeda 2025



Dari data tabel sumber daya manusia diatas bila disandingkan dengan struktur organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan maka, personil yang menduduki Jabatan struktural sebanyak 6 orang atau 25%, dibandingkan dengan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebanyak 23 orang atau 75% hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan system Reward and Punishment yang tegas dan adil.

Mengacu pada job description dan job analysis bahwa tiap-tiap jabatan eselon IV setara dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator dibawah kesekretariatan dan Bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi minimal 3 orang personil dengan tingkat kualifikasi pendidikan Sarjana atau Pasca Sarjana. Sesungguhnya komposisi ideal total personil Bappeda dengan Struktur Organisasi saat ini adalah 49 orang ditambah dengan kualifikasi tenaga fungsional perencanaan 10% dan UPT data.

Tuntutan pekerjaan mengharuskan pegawai senantiasa menguasai informasi dan regulasi terkini dalam merumuskan setiap kebijakan dan tugas kedinasan, tetapi tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Upaya untuk meningkatkan performa kinerja pegawai sebelum melakukan kerja, idealnya mengikuti diklat terlebih dahulu.

Berikut Diklat/ kursus yang pernah diikuti personil Bappeda yaitu :

- ❖ Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMP-PD) ❖ Manajemen Strategis Produk Unggulan Daerah
- ❖ Perencanaan Pembangunan Produk Domestik Regional Bruto
- ❖ Orientasi Peningkatan Kapasitas Manajemen Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- ❖ Kursus Rencana Teknik Penghijauan ❖ Kursus Sistem Informasi Pesisir
- ❖ Kursus Sistem Informasi Geografis
- ❖ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ❖ TOT Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002



- ❖ Sistem Tata Usaha Keuangan Daerah
- ❖ Diklat Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota se - Indonesia
- ❖ Penyusunan RASK/DASK dan RAPBD pola Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 ❖ Diklat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- ❖ Teknik Manajemen Perencana Pembangunan Lanjutan (TMP-PL) ❖ Workshop Planning Financial Province and District
- ❖ Kursus Keuangan Daerah (KKD) 4 bulan
- ❖ Diklat Permendagri No. 13 Tahun 2006
- ❖ Diklat Permendagri No. 54 Tahun 2010 ❖ Bimtek Penyusunan RPJMD
- ❖ Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama ❖ Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Online ❖ Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja SKPD ❖ Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)

2. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2
5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1



12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja $1\frac{1}{2}$ Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2
21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2
29	Printer	7
30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3
35	Meja Rapat Bundar	1
36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi $1\frac{1}{2}$ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Sumber : Bappeda 2025



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda didukung Sarana operasional kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 7 unit. Kondisi ini sudah cukup baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 3.6
Data Kendaraan Dinas

NO	Uraian	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1	Kepala	1	-
2	Sekretaris	1	3
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan	-	2
4	Evaluasi Pembangunan Bidang Fisik	1	1
5	Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1

Tabel 3.7
Data Sarana dan Prasarana yang masih tidak terpakai (tidak dapat dipergunakan)

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Sepeda Motor Suzuki A.100	1992	1 Unit
2.	Sepeda Motor Honda GL	1994	1 Unit
3.	LCD Proyektor Panasonic LB.332	2016	1 Unit
4.	Handyam Panasonic	2004	1 Unit
5.	Digicam Olympus	2004	1 Unit
6.	Hard Disk Eksternal Toshiba	2016	1 Unit
7.	Genset Hetsudenki	2005	1 Unit
8.	Komputer Samsung	2004	1 Unit
9.	Laptop Toshiba	2005	1 Unit
10.	Komputer Logix P-III	2005	1 Unit
11.	Komputer	2002	1 Unit



No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah
12.	Printer Canon Pixma Mx.308	2002	1 Unit
13.	Mesin Tik Olimpia	2006	1 Unit
14.	Kursi Putar	2004	1 buah
15.	Lemari Kayu Olympic	2001	1 Buah
16.	Meja Komputer	2002	1 buah
17.	Filling Cabinet	2002	1 buah
18.	Meja 1 Biro	2001	1 buah
19.	Meja ½ biro	2002	1 buah
20.	Meja 1 Biro olympic	2002	1 buah
21.	Filling Cabinet	2001	1 buah
22.	Tiang Triangle	2008	1 set
23.	Antena Seet	2008	1 set
24.	Antena Sectoral Microwave 5,4 GH	2008	1 Set
25.	Layar OHP	2006	1 Set

3. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. DPA menjadi acuan utama dalam pengendalian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 3.8 Analisis DPA

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	PERENCANAAN	5.852.042.652
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.638.619.977
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	85.822.200
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.074.532
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.507.800
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.330.400
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.136.745
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	102.300.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.018.600
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.429.700
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.180.457.275
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	881.321.275
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi PemerintahanT Daerah BidangPerencanaan Pembangunan Daerah	70.170.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	228.966.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.037.182.600
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484.516.500



5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	318.074.600
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	234.591.500

DPA Murni Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar Rp.7.868.054.041,- setelah adanya Efisiensi anggaran berkurang sebesar Rp. 5.680.385.291,- dan mengalami penambahan anggaran pada perubahan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5.852.042.652,- dengan penambahan sebesar Rp.171.657.361,- ,



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHEI 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja pegawai, agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan:

- a. Menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis aplikasi E-Kinerja BKN sebagai dasar penilaian produktivitas pegawai.
- b. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.
- c. Mengintegrasikan capaian kinerja individu dengan pemberian tunjangan kinerja sehingga terdapat korelasi langsung antara kinerja dan penghasilan.
- d. Mendorong peningkatan disiplin dan tanggung jawab pegawai melalui evaluasi kinerja secara berkala.

2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor :050/634/IV.02/KPTS/2022 tanggal 13 Maret 2022 dan melalui Peraturan Bupati Lampung



Barat Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	poin	21,55	21,67	100
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP	poin	19,90	19,90	100

Sumber: RPD Bappeda 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa seluruh indikator- indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 target dari Komponen Perencanaan Kinerja melebihi dari target yang direncanakan sedangkan untuk target dari Komponen Pengukuran Kinerja sesuai target yang direncanakan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

a. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebanyak 1 sasaran.

Komponen perencanaan kinerja merupakan salah satu dari 4 komponen penilaian



AKIP yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Dalam lembar hasil evaluasi AKIP 2025 terdapat rekomendasi yang sebagian besarnya termasuk dalam komponen perencanaan kinerja. Diantaranya terkait keselarasan dokumen perencanaan kinerja, perbaikan kualitas perencanaan yang lebih berorientasi hasil, serta indikator kinerja yang harus SMART. Bappeda telah melakukan berbagai upaya intensif dan inklusif terhadap masing-masing perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi tingkat pemahaman penanggung jawab pelaporan pada masing-masing perangkat daerah yang berbeda. Secara kolektif maupun pendampingan khusus atas permintaan perangkat daerah telah dilakukan oleh Bappeda.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu prioritas utama. Salah satu komponen yang memiliki bobot strategis dalam penilaian SAKIP adalah **Komponen Perencanaan Kinerja**, yang menilai kualitas dokumen perencanaan, keselarasan antar dokumen, ketepatan indikator kinerja, serta konsistensi cascading kinerja hingga level individu.

Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah tersusun secara sistematis, terukur, selaras dengan RPJMD, serta berorientasi pada outcome.

Laporan ini disusun untuk menggambarkan teknis pelaksanaan kegiatan penguatan Komponen Perencanaan Kinerja, bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD), serta sinergi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP mencakup:

- 1) Kualitas dan keselarasan dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja.
- 2) Penyusunan Pohon Kinerja (Pokin).
- 3) Penyusunan dan ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 4) Cascading kinerja sampai level unit kerja dan individu.
- 5) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dan terukur.

Meski hasilnya telah mencapai target, namun Bappeda masih membutuhkan sinergitas Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah serta perangkat daerah sebagai pelaksana teknis perencanaan pembangunan daerah. Keinginan berbenah menjadi lebih baik masih ada dalam diri perangkat daerah, semangat mendampingi



perbaikan tetap terjaga dalam diri Bappeda. Maka pencapaian yang sedikit ini menjadi pijakan untuk semakin lebih baik lagi dalam merencanakan kinerja.

Beberapa kendala teknis dalam upaya implementasi komponen perencanaan kinerja ini berupa kemampuan analisa kelemahan, kekuatan, peluang dan hambatan dalam proses perencanaan. Perangkat daerah sering kali terjebak bussiness as usual, artinya pekerjaan yang direncanakan merupakan hal-hal yang seperti biasa pernah dilakukan saja. Padahal, isu sosial terus berkembang dan berubah, kondisi lingkungan, ekonomi dan politik juga bergerak. Hal ini menjadi tantangan serius yang menjadi fokus pendampingan Bappeda agar perangkat daerah dapat mampu melihat dari paradigma yang lebih luas dan terlepas dari bussiness as usual.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten memiliki peran strategis dan sentral dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai koordinator perencanaan, Bappeda memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Adapun hal-hal krusial yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten meliputi:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Secara teknis, kegiatan penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum konsultasi publik, koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi pembahasan dengan DPRD, serta penyempurnaan dan penetapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyusunan tersebut, Bappeda membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur internal Bappeda (bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta sekretariat), serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, pada tahapan tertentu turut



melibatkan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, serta instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen tersebut antara lain:

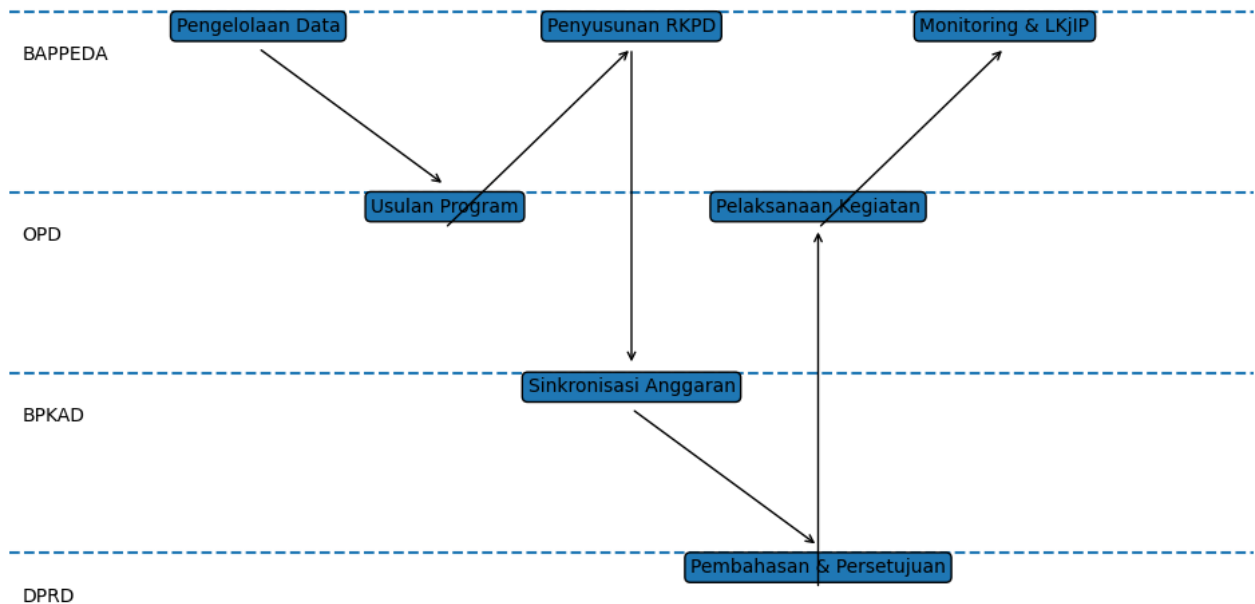
1. **Pengumpulan dan verifikasi data pembangunan**, meliputi data capaian kinerja, indikator makro daerah, serta data sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah.
2. **Rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah**, yang dilaksanakan secara berkala untuk menyelaraskan program, kegiatan, indikator, dan target kinerja agar konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
3. **Forum Konsultasi Publik dan/atau Musrenbang**, yang melibatkan unsur DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan dan penyempurnaan substansi dokumen.
4. **Desk pembahasan Renstra dan Renja Perangkat Daerah**, yang bertujuan memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD.
5. **Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran**, melalui koordinasi dengan BPKAD untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan KUA-PPAS serta APBD.

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan bersifat formal, terstruktur, dan partisipatif, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan masukan, koreksi, serta usulan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing urusan. Setiap hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan dokumen perencanaan.

Melalui tahapan dan mekanisme tersebut, Bappeda memastikan bahwa dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil pembangunan daerah serta terintegrasi antar sektor, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.



Peta Lintas Fungsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



2) Pelaksanaan dan Koordinasi Musrenbang

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah.

Secara teknis, peran Bappeda dalam pelaksanaan Musrenbang meliputi penyusunan pedoman pelaksanaan, penyiapan jadwal dan tahapan kegiatan, koordinasi dengan kecamatan dan Perangkat Daerah, serta pengendalian dan verifikasi hasil usulan masyarakat. Pada tahap awal, Musrenbang Desa/Kelurahan difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan dengan pendampingan kecamatan, yang menghasilkan daftar usulan kegiatan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya, pada Musrenbang Kecamatan, Bappeda berkoordinasi dengan camat dan perangkat daerah terkait untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pemeringkatan usulan desa/kelurahan berdasarkan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif kecamatan, serta kewenangan pemerintah daerah. Perangkat Daerah hadir sesuai



dengan urusan masing-masing untuk memberikan tanggapan teknis terhadap usulan yang disampaikan.

Pada tahapan Forum Perangkat Daerah, Bappeda memfasilitasi pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, unsur DPRD, serta pemangku kepentingan terkait. Forum ini bertujuan menyelaraskan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sekaligus memastikan konsistensi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD.

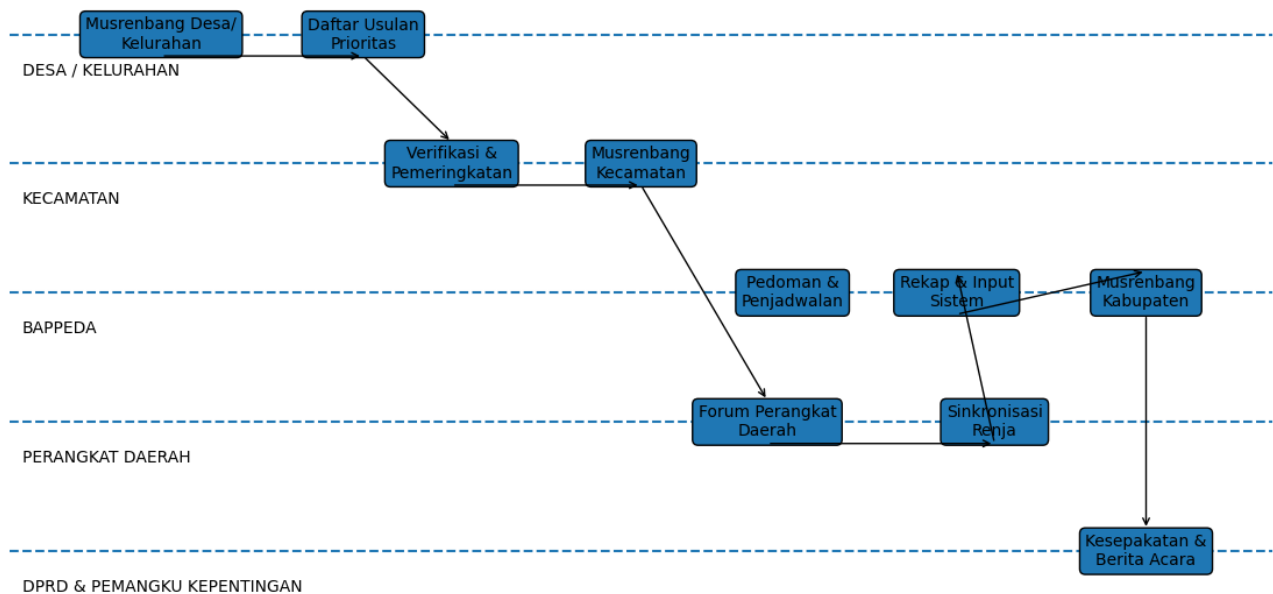
Tahapan akhir adalah Musrenbang Kabupaten, yang dikoordinasikan langsung oleh Bappeda dan melibatkan Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur lainnya. Dalam forum ini dipaparkan rancangan RKPD beserta prioritas pembangunan daerah, serta dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama atas prioritas pembangunan yang telah disepakati.

Seluruh proses Musrenbang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bappeda melakukan rekapitulasi dan input usulan ke dalam sistem perencanaan daerah, melakukan sinkronisasi dengan kemampuan keuangan daerah, serta memastikan bahwa usulan yang memenuhi kriteria prioritas dan kewenangan dapat diakomodasi dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Melalui mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi terintegrasi secara sistematis ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.



Peta Lintas Fungsi Pelaksanaan dan Koordinasi Musrenbang



3) Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi dasar penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah seperti LKjIP/LAKIP.

Secara teknis, kegiatan pengendalian dan monitoring dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

1. Monitoring Capaian Indikator Kinerja

- Bappeda melakukan pemantauan secara berkala terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- Pengumpulan data capaian dilakukan melalui koordinasi dengan masing-masing Perangkat Daerah dan instansi teknis terkait.



- o Hasil monitoring dikompilasi untuk mengevaluasi progres terhadap target output dan outcome yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan

- o Bappeda menelaah laporan realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan dari Perangkat Daerah.
- o Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana (RKPD/Anggaran) dan realisasi, termasuk identifikasi deviasi dan kendala pelaksanaan.
- o Temuan evaluasi disampaikan melalui rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah dan/atau Forum OPD untuk tindak lanjut perbaikan.

3. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

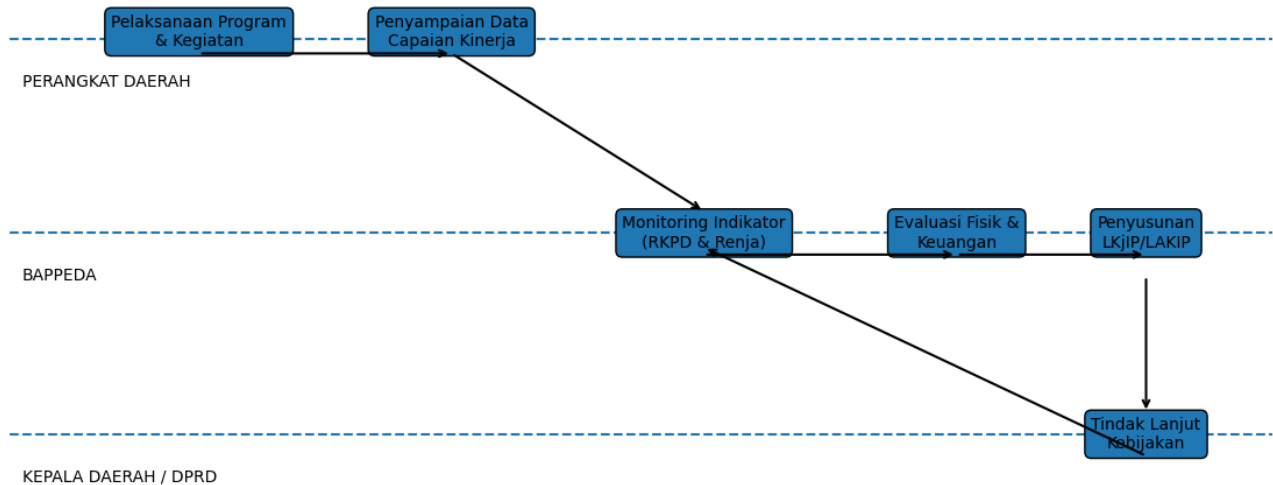
- o Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Bappeda menyusun laporan kinerja pemerintah daerah (LKjIP/LAKIP) yang memuat capaian kinerja, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.
- o Laporan ini menjadi dokumen penting bagi Kepala Daerah, DPRD, serta instansi pembina untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Kegiatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan Bappeda bersifat sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat program/kegiatan Perangkat Daerah hingga capaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh perencanaan yang telah disusun benar-benar menghasilkan output dan outcome yang terukur, mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan di tahun berikutnya.

Melalui fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi ini, Bappeda berperan sebagai **koordinator integrasi pembangunan**, menjembatani perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Peta Lintas Fungsi Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan



4) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab untuk memastikan **keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah** (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD), sehingga perencanaan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran.

Secara teknis, kegiatan sinkronisasi dilakukan melalui beberapa mekanisme:

1. Koordinasi Internal dengan Perangkat Daerah

- Bappeda memfasilitasi rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan pagu indikatif masing-masing OPD.
- Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian indikator kinerja, target fisik, dan alokasi anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, atau ketidaksesuaian prioritas.

2. Koordinasi dengan BPKAD



- Bappeda berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kapasitas keuangan daerah.
- Penyesuaian ini memastikan setiap program/kegiatan memiliki pendanaan yang cukup untuk mencapai target output dan outcome sesuai perencanaan.

3. Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

- Bappeda memfasilitasi forum resmi, baik pada tingkat OPD maupun forum gabungan (misalnya Pra-Musrenbang Kabupaten), untuk membahas prioritas pembangunan dan penyelarasan anggaran.
- Forum ini diikuti oleh Perangkat Daerah terkait, Sekretariat Daerah, BPKAD, Inspektorat, serta unsur DPRD jika diperlukan, dengan agenda utama verifikasi dan klarifikasi program/kegiatan.

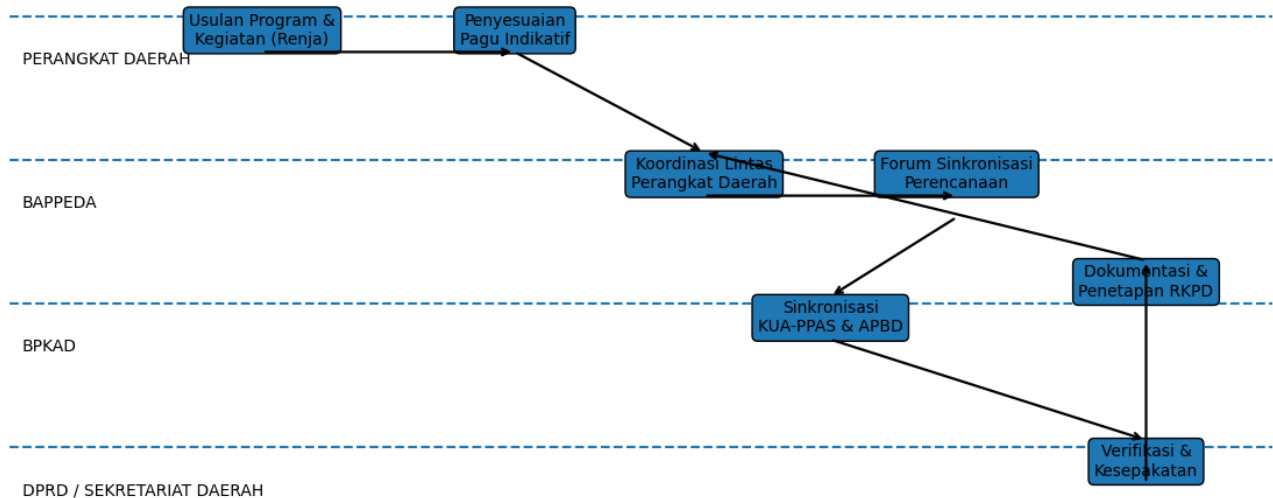
4. Dokumentasi dan Penetapan

- Hasil sinkronisasi dituangkan dalam berita acara dan dituangkan ke dalam dokumen RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD.
- Bappeda memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran saling terintegrasi, konsisten, dan akuntabel.

Kegiatan sinkronisasi ini bersifat sistematis, berjenjang, dan partisipatif, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dapat didanai dan dilaksanakan secara tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, Bappeda memastikan **perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan terpisah dari penganggaran**, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Peta Lintas Fungsi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran



5) Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan sebagai basis utama dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Fungsi ini menjadi kunci untuk menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada **data yang valid, akurat, dan terkini**, sehingga output dan outcome pembangunan dapat terukur secara jelas.

Secara teknis, pengelolaan data dan informasi pembangunan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pengumpulan dan Validasi Data Pembangunan

- Bappedda mengumpulkan data dari seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing, termasuk data sektoral, indikator kinerja, capaian fisik dan keuangan, serta data sosial-ekonomi daerah.
- Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan akurasi sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi.

2. Integrasi dan Pengolahan Data



- o Data pembangunan diintegrasikan ke dalam sistem informasi pembangunan daerah, baik melalui aplikasi lokal maupun nasional, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- o Bappeda melakukan analisis data untuk menghasilkan informasi strategis, termasuk pemetaan prioritas pembangunan, tren capaian kinerja, serta identifikasi isu strategis daerah.

3. Pemanfaatan Data untuk Perencanaan dan Pengendalian

- o Informasi hasil pengolahan data digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dan sebagai bahan pengendalian serta evaluasi pembangunan.
- o Data juga digunakan dalam rapat koordinasi, forum musrenbang, serta desk evaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

4. Pelaporan dan Publikasi Informasi

- o Bappeda menyusun laporan kinerja pembangunan daerah, termasuk LKjIP/LAKIP, yang memuat capaian indikator kinerja, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.
- o Informasi pembangunan juga disajikan secara terstruktur untuk publik, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Teknologi

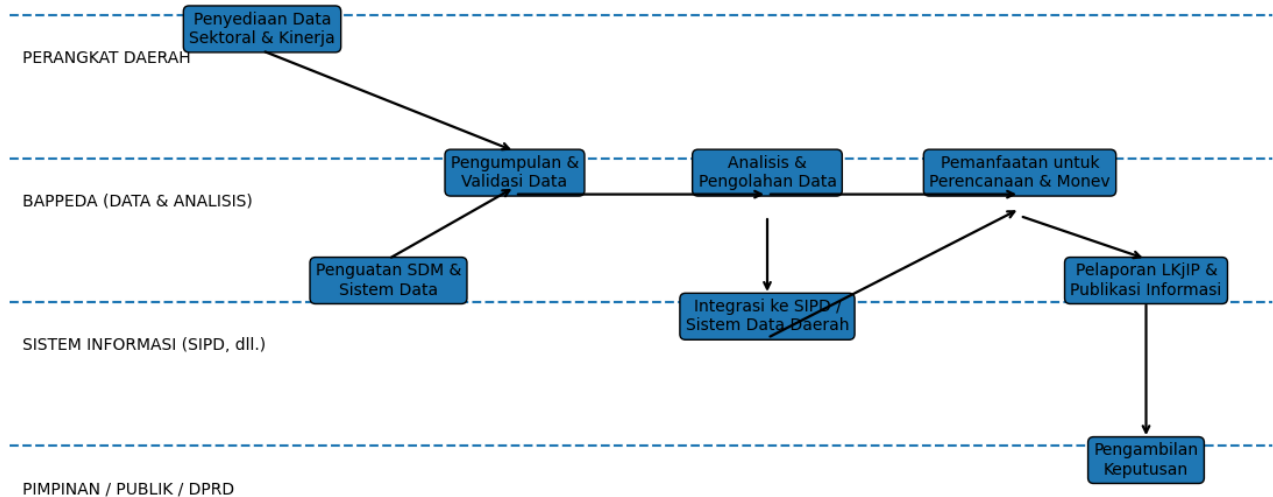
- o Bappeda melakukan pembinaan dan pelatihan internal terkait manajemen data dan aplikasi perencanaan pembangunan.
- o Sistem pengelolaan data terus disempurnakan agar mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara efektif, efisien, dan akurat.

Melalui pengelolaan data dan informasi pembangunan yang sistematis, Bappeda Kabupaten Lampung Barat memastikan seluruh proses perencanaan, pengendalian, dan



evaluasi pembangunan daerah berbasis bukti, terintegrasi antar sektor, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang terukur, efisien, dan berkelanjutan.

Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan



6) Penyusunan Kajian Strategis dan Tematik

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat secara rutin menyusun **kajian strategis dan tematik**. Kajian ini menjadi dasar analisis, perumusan kebijakan, dan penetapan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran oleh Pemerintah Kabupaten.

Secara teknis, penyusunan kajian strategis dan tematik dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Identifikasi Isu Strategis dan Tematik

- Bappeda mengidentifikasi isu pembangunan strategis dan tematik yang relevan, baik bersifat sektoral maupun lintas sektor, dengan memperhatikan data pembangunan, evaluasi kinerja sebelumnya, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, serta kebijakan nasional dan provinsi.

2. Pengumpulan dan Analisis Data



- o Data yang relevan dikumpulkan dari Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga riset, dan sumber resmi lainnya.
- o Analisis dilakukan secara sistematis, termasuk pemetaan permasalahan, tren capaian, potensi, dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program/kegiatan pembangunan.

3. Penyusunan Draft Kajian

- o Hasil analisis dituangkan dalam draft kajian strategis atau tematik yang memuat latar belakang, isu strategis, rekomendasi kebijakan, serta dampak yang diharapkan.
- o Draft kajian dibahas dalam forum internal Bappeda, desk teknis, atau rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

4. Koordinasi dan Validasi

- o Bappeda memfasilitasi rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan validasi kajian.
- o Masukan dari forum ini dijadikan dasar penyempurnaan draft kajian agar lebih akurat, komprehensif, dan aplikatif.

5. Pemanfaatan Hasil Kajian

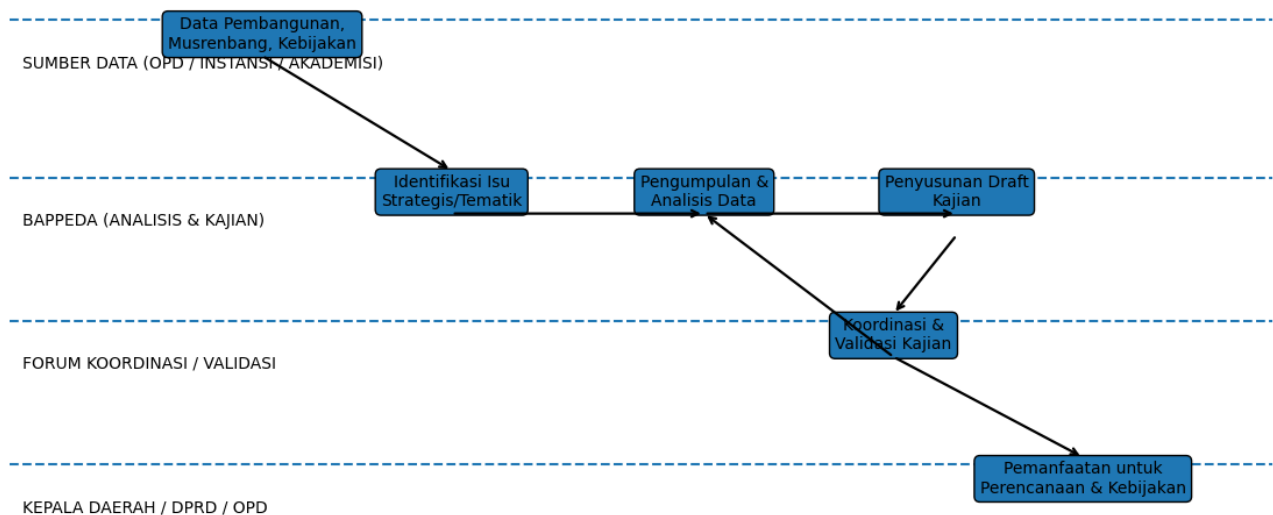
- o Kajian strategis dan tematik digunakan sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), pengendalian dan evaluasi program/kegiatan, serta penyusunan kebijakan prioritas pembangunan.
- o Kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Kepala Daerah dan DPRD, serta sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyusunan kajian strategis dan tematik yang sistematis dan berbasis bukti, Bappeda Kabupaten Lampung Barat memastikan bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah **mengutamakan efektivitas, efisiensi, serta**



keterpaduan antar sektor, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peta Lintas Fungsi Penyusunan Kajian Strategis dan Tematik



b. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP

Komponen pengukuran kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa capaian kinerja perangkat daerah dapat diukur secara objektif, akurat, dan tepat waktu. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, nilai komponen pengukuran kinerja menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja dilakukan secara periodik untuk memantau perkembangan capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Pada pada Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menargetkan Nilai 19.90 Point dan hasil Evaluasi Sakip 2025 Komponen Pengukuran Kinerja mendapatkan Nilai 19,90 Point dari Kementerian PANRB, secara target telah dicapai 100 % namun Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat diberi catatan perlu ada konfirmasi lebih lanjut terkait kepatuhan perangkat daerah melaksanakan pengukuran kinerja secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku dan direkomendasikan perlu penguatan mekanisme pengukuran melalui jadwal terstandar dan validasi data, serta penunjukan penanggung jawab pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Terkait catatan dan rekomendasi tersebut guna meningkatkan kualitas implementasi pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat akan memastikan penguatan sistem pengukuran kinerja melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

1. **mekanisme dan jadwal pengukuran kinerja yang terstandar** yang mengatur proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data capaian indikator kinerja secara periodik. Penetapan jadwal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengukuran kinerja dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan selaras dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah;
2. mendorong setiap perangkat daerah untuk **menetapkan penanggung jawab pengelolaan data kinerja (data owner)** pada masing-masing indikator kinerja utama maupun indikator program/kegiatan, sehingga terdapat kejelasan peran dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data kinerja;
3. memperkuat **proses verifikasi dan validasi data kinerja** melalui mekanisme reviu capaian kinerja secara berkala, guna memastikan bahwa data yang disampaikan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan definisi operasional indikator, metode pengukuran, serta sumber data yang ditetapkan; dan
4. melaksanakan **monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pengukuran kinerja perangkat daerah**, termasuk melakukan pembahasan capaian indikator secara periodik sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
5. melakukan **pembinaan dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah** dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap metodologi pengukuran kinerja, kualitas pengelolaan data kinerja, serta konsistensi penerapan prinsip pengukuran kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pengukuran kinerja perangkat daerah



menjadi lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dalam mendukung pengukuran kinerja, Bappeda memanfaatkan aplikasi **SAKTI BERKIBAR**. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa aplikasi ini memadai untuk **menginventarisir perencanaan, serta memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara triwulanan**.

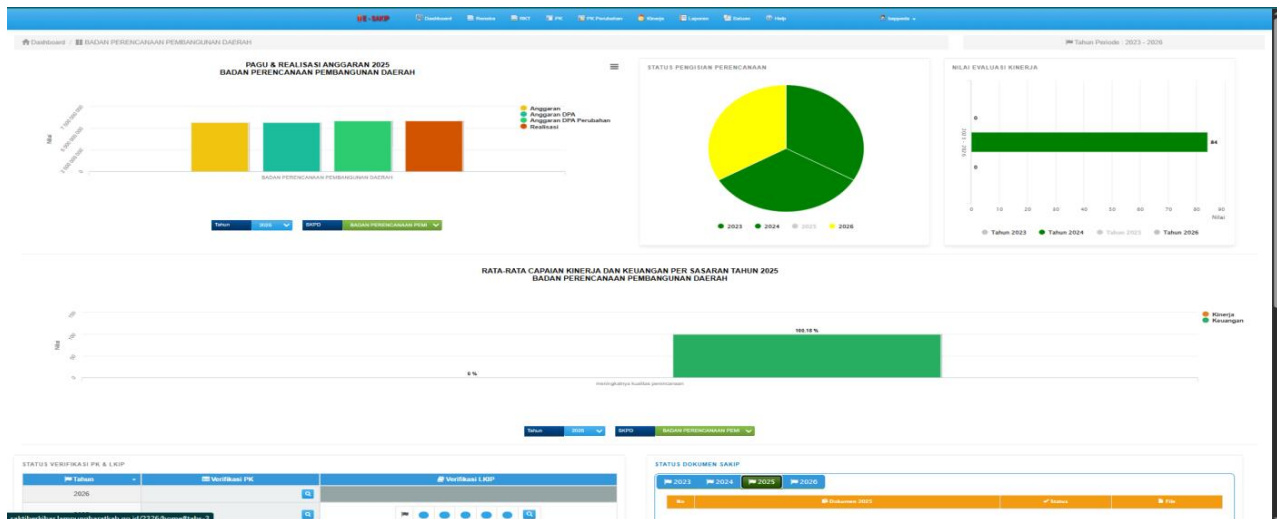
Namun, aplikasi ini masih belum terintegrasi dengan sistem penambahan penghasilan pegawai (TPP), sehingga belum optimal dalam mendukung perhitungan remunerasi. Kendala utama integrasi meliputi besarnya anggaran pengembangan sistem dan perlunya peningkatan komitmen bersama seluruh Perangkat Daerah terkait.

Rencana perbaikan aplikasi ke depan meliputi:

1. **Integrasi dengan sistem TPP**, sehingga perhitungan remunerasi pegawai dapat langsung memanfaatkan data capaian kinerja.
2. **Penguatan mekanisme validasi dan dokumentasi data**, agar pengumpulan data kinerja lebih konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Penyempurnaan definisi operasional indikator**, sehingga setiap indikator memiliki standar pengukuran yang jelas dan seragam antar Perangkat Daerah.
4. **Pelatihan dan pembinaan SDM**, agar seluruh staf perangkat daerah mampu memanfaatkan aplikasi secara optimal.
5. **Pengembangan modul analisis capaian kinerja**, sehingga aplikasi tidak hanya menjadi alat inventarisasi, tetapi juga mampu menghasilkan laporan evaluasi yang komprehensif dan mudah dipahami.

Dengan implementasi rencana perbaikan ini, Bappeda Kabupaten Lampung Barat berharap aplikasi SAKTI BERKIBAR dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pengukuran kinerja, penyusunan laporan SAKIP, serta pengambilan keputusan berbasis data, sehingga akuntabilitas dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dapat terus meningkat.

Teknologi informasi seperti aplikasi SAKTI BERKIBAR, hal ini dapat dilihat pada data berikut:



Sumber : Aplikasi SAKTI BERKIBAR Tahun 2025

3. Perbandingan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/634/IV.02/KPTS/2022 tanggal 13 Maret 2022 telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut:

- **Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator:**
 1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP
 2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP



Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Perbandingan Kinerja dengan tahun sebelumnya

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan						
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Nilai Hasil Evaluas SAKIP dari Kemenpan RB	Poin	22,50	21,34	21,55	21,67
Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	Poin	19,50	19,70	19,90	19,90

Sebagai perbandingan dengan capaian indikator sasaran Bappeda Kabupaten Lampung Barat maka perlu dibandingkan dengan capaian indikator sasaran Bappeda Provinsi Lampung, namun dengan adanya perbedaan nomenklatur indikator sasaran dimana Bappeda Provinsi Lampung masih mengacu pada RPJMD 2025-2029 maka sasaran pendukung (nilai SAKIP) saja yang bisa disandingkan seperti data dibawah ini :

TAHUN	NILAI SAKIP	
	KAB. LAMPUNG BARAT	PROVINSI LAMPUNG
2024	B	B
2025	B	BB

Sedangkan untuk Indikator kinerja BAPPENAS RI tidak bisa di bandingkan dikarenakan adanya perbedaan Nomenklatur.

Bappeda secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagai mana yang tercantum dalam dokumen lima tahunan (renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2025 indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kabupaten Lampung Barat mencapai target capaian kinerja.

Keberhasilan IKU BAPPEDA 2025 didukung oleh sub kegiatan yang dilaksanakan, karena setiap sub kegiatan merupakan bagian dari strategi operasional yang membantu



merealisasikan target IKU. Sub kegiatan menghasilkan output yang berkontribusi langsung terhadap target IKU, baik dalam bentuk data, rekomendasi kebijakan, atau layanan kepada masyarakat. Berikut rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian IKU Bappeda Tahun 2025.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- 1) Ketepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan serta pelayanan terhadap Perangkat Daerah yang mengacu kepada dokumen perencanaan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan alokasi dana yang optimal;
- 2) Pengelolaan risiko yang baik terhadap kemungkinan yang terjadi atau menghambat tercapainya kinerja;
- 3) Adanya koordinasi dengan stakeholder dalam meningkatkan pemanfaatan penelitian atau kajian untuk mendukung kebijakan daerah; dan
- 4) Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA BAPPEDA Tahun Anggaran 2025.

4. Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d. Bulan ini
	2	3	13 (6+9+12)
	BELANJA DAERAH	5.852.042.652,00	5.747.558.147,00
	Belanja Operasional	5.852.042.652,00	5.747.558.147,00
	Belanja Pegawai	2.936.440.132,00	2.886.480.266,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	Belanja Barang dan Jasa	2.813.302.520,00	2.761.318.756,00
	Belanja Hibah	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	Belanja Modal	102.300.000,00	99.759.125,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.300.000,00	99.759.125,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
	Belanja Modal aset tetap lainnya	-	-
	Belanja Modal aset tetap lainnya	-	-
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.634.402.777,00	#REF!
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.922.200,00	85.694.100,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.796.000,00	63.567.900,00
5.01.01.2.01.0001.5	BELANJA DAERAH	63.796.000,00	63.567.900,00
5.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	63.796.000,00	63.567.900,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.796.000,00	63.567.900,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	20.637.000,00	20.637.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.637.000,00	20.637.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.047.000	14.047.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.250.000	1.250.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.100.000	2.100.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000	3.240.000,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.159.000,00	42.930.900,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.159.000,00	42.930.900,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.564.000	40.380.900,00
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.595.000	2.550.000,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.881.200,00	1.881.200,00
5.01.01.2.01.0002.5	BELANJA DAERAH	1.881.200,00	1.881.200,00
5.01.01.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.881.200,00	1.881.200,00
5.01.01.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.200,00	1.881.200,00
5.01.01.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	1.881.200,00	1.881.200,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.881.200,00	1.881.200,00
5.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.501.200	1.501.200,00
5.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130.000	130.000,00
5.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000	250.000,00
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5	BELANJA DAERAH	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.670.000,00	1.670.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.360.000	1.360.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000	185.000,00
5.01.01.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000	125.000,00
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.809.200,00	1.809.200,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.01.0004.5	BELANJA DAERAH	1.809.200,00	1.809.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.809.200,00	1.809.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.200,00	1.809.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	1.809.200,00	1.809.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.809.200,00	1.809.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.499.200	1.499.200,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000	185.000,00
5.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000	125.000,00
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0004.5	BELANJA DAERAH	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.073.800,00	2.073.800,00
5.01.01.2.01.0005.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.638.800	1.638.800,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000	185.000,00
5.01.01.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000	250.000,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5	BELANJA DAERAH	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.530.000,00	1.530.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000	900.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130.000	130.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000	100.000,00
5.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000	400.000,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.162.000,00	13.162.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.01.0007.5	BELANJA DAERAH	13.162.000,00	13.162.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	13.162.000,00	13.162.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.162.000,00	13.162.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	13.162.000,00	13.162.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.162.000,00	13.162.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.327.000	12.327.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	435.000	435.000,00
5.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000	400.000,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.940.757.332,00	2.890.797.466,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.936.440.132,00	2.886.480.266,00
5.01.01.2.02.0001.5	BELANJA DAERAH	2.936.440.132,00	2.886.480.266,00
5.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.936.440.132,00	2.886.480.266,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.936.440.132,00	2.886.480.266,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.276.242,00	1.913.193.494,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.522.031.302,00	1.489.177.102,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.431.954.070,00	1.402.145.970,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.077.232,00	87.031.132,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.864.396,00	145.643.118,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 2.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.055.062,00	135.199.384,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 2.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.809.334,00	10.443.734,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.599.000,00	91.400.000,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 3.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.599.000,00	91.400.000,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	69.883.200,00	69.878.000,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 4.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	69.883.200,00	69.878.000,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.103.932,00	29.085.832,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 5.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.902.100,00	24.060.000,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 5.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.201.832,00	5.025.832,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 6	Belanja Tunjangan Beras ASN	84.324.100,00	78.539.490,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 6.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.280.120,00	72.637.260,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 6.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.043.980,00	5.902.230,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.450.353,00	9.450.353,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 7.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.450.353,00	9.450.353,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.959,00	19.599,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 8.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.591,00	18.331,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.0 8.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.368,00	1.268,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	976.163.890,00	973.286.772,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.0 1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	976.163.890,00	973.286.772,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.0 1.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	924.417.990,00	922.810.772,00
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.0 1.0002	Tambahan Penghasilan PPPK	51.745.900,00	50.476.000,00
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5	BELANJA DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	755.000,00	755.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	120.000,00
5.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	1.637.400,00	1.637.400,00



	Triwulanan / Semesteran SKPD		
5.01.01.2.02.0007.5	BELANJA DAERAH	1.637.400,00	1.637.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.637.400,00	1.637.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.637.400,00	1.637.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	1.637.400,00	1.637.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.637.400,00	1.637.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.147.400	1.147.400,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.000	65.000,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000	300.000,00
5.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000	125.000,00
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.679.800,00	1.679.800,00
5.01.01.2.02.0008.5	BELANJA DAERAH	1.679.800,00	1.679.800,00
5.01.01.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.679.800,00	1.679.800,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.800,00	1.679.800,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	1.679.800,00	1.679.800,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.679.800,00	1.679.800,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.069.800	1.069.800,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000	260.000,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000	100.000,00
5.01.01.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000	250.000,00
5.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.507.800,00	4.507.800,00
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5	BELANJA DAERAH	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	2.698.000,00	2.698.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.858.000	1.858.000,00
5.01.01.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	315.000	315.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	525.000	525.000,00
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5	BELANJA DAERAH	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	1.809.800,00	1.809.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.159.800	1.159.800,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000	250.000,00
5.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000	400.000,00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.330.400,00	32.327.950,00
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.797.400,00	11.797.400,00
5.01.01.2.05.0003.5	BELANJA DAERAH	11.797.400,00	11.797.400,00



5.01.01.2.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.797.400,00	11.797.400,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.797.400,00	11.797.400,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	11.797.400,00	11.797.400,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	11.797.400,00	11.797.400,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.292.400,00	8.292.400,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	880.000,00	880.000,00
5.01.01.2.05.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.625.000,00	2.625.000,00
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaliasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5	BELANJA DAERAH	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	4.843.000,00	4.843.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	1.413.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.000,00	65.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00
5.01.01.2.05.0005.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.240.000,00
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.690.000,00	15.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5	BELANJA DAERAH	15.690.000,00	15.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.690.000,00	15.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.690.000,00	15.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.02	Belanja Barang	5.000.000,00	15.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.02.1 2	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.02.1 2.0001	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.690.000,00	10.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.690.000,00	10.687.550,00
5.01.01.2.05.0009.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.690.000,00	10.687.550,00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.136.745,00	203.836.745,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	3.742.000,00	3.742.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	Penerangan Bangunan Kantor		
5.01.01.2.06.0001.5	BELANJA DAERAH	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.742.000,00	3.742.000,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5	BELANJA DAERAH	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.912.500,00	16.902.500,00
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera mata	7.500.000,00	7.500.000,00
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	9.412.500,00	9.402.500,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.459.600,00	36.459.600,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.06.0005.5	BELANJA DAERAH	36.459.600,00	36.459.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	36.459.600,00	36.459.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.459.600,00	36.459.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	36.459.600,00	36.459.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.459.600,00	36.459.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.759.600,00	33.759.600,00
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5	BELANJA DAERAH	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.550.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.943.920,00	14.943.920,00
5.01.01.2.06.0008.5	BELANJA DAERAH	14.943.920,00	14.943.920,00



5.01.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	14.943.920,00	14.943.920,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.943.920,00	14.943.920,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	14.943.920,00	14.943.920,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.943.920,00	14.943.920,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor Lainnya	583.920,00	583.920,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.776.000,00	5.776.000,00
5.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.584.000,00	8.584.000,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5	BELANJA DAERAH	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.528.725,00	120.238.725,00
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.014.000,00	110.724.000,00
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.514.725,00	9.514.725,00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.300.000,00	99.759.125,00



5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.300.000,00	99.759.125,00
5.01.01.2.07.0006.5	BELANJA DAERAH	102.300.000,00	99.759.125,00
5.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	102.300.000,00	99.759.125,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.300.000,00	99.759.125,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.300.000,00	8.800.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.800.000,00	8.800.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.800.000,00	8.800.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	8.500.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.500.000,00	8.500.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	85.000.000,00	82.459.125,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	58.871.625,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	45.000.000,00	44.996.625,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Personal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	13.875.000,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.000.000,00	23.587.500,00
5.01.01.2.07.0006.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.000.000,00	23.587.500,00
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.018.600,00	62.005.238,00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.08.0001.5	BELANJA DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0001.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.	BELANJA DAERAH	26.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.600.000,00	13.213.838,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0059	Belanja tagihan telepon	600.000,00	483.884,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.000.000,00	555.250,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.000.000,00	3.473.384,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	18.000.000,00	8.701.320,00
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	-



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.0 4.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	3.000.000,00	-
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.418.600,00	45.791.400,00
5.01.01.2.08.0004.5	BELANJA DAERAH	46.418.600,00	45.791.400,00
5.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	46.418.600,00	45.791.400,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.418.600,00	45.791.400,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	29.498.600,00	28.871.400,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	29.498.600,00	28.871.400,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.564.600,00	16.564.600,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor kertas dan cover Lainnya	3.125.000,00	3.125.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-persediaan dokumen/administrasi tender Lainnya	825.000,00	250.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.075.000,00	4.075.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	1.525.200,00	1.473.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.0 1.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.383.800,00	3.383.800,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Lainnya		
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.920.000,00	16.920.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.920.000,00	16.920.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.200.000,00	4.200.000,00
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.720.000,00	12.720.000,00
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.429.700,00	#REF!
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.950.000,00	79.462.503,00
5.01.01.2.09.0002.5	BELANJA DAERAH	87.950.000,00	79.462.503,00
5.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.950.000,00	15.950.000,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	15.950.000,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	15.950.000,00	15.950.000,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.950.000,00	6.640.503,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.950.000,00	6.640.503,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.600.000,00	6.640.503,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	56.872.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.09.0002.5.1.02.02.0 1.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.600.000,00	56.872.000,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.400.000,00	47.184.500,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.0 2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.400.000,00	9.687.500,00
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.0 2.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.600.000,00	
5.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.0 2.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Roda Dua Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.800.000,00	39.750.000,00
			39.750.000,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.500.000,00	39.750.000,00
5.01.01.2.09.0006.5	BELANJA DAERAH	40.500.000,00	39.750.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	12.620.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	12.620.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	12.620.000,00	1.070.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	12.620.000,00	11.550.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.0 1.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.070.000,00	27.130.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.0 1.0018	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.550.000,00	27.130.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.880.000,00	1.850.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.880.000,00	9.800.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Bantu-Electric Generating Set	1.850.000,00	1.000.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - alat kantor lainnya	9.800.000,00	10.340.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Vidio dan Film	1.000.000,00	4.140.000,00
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.090.000,00	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	49.934.700,00
			49.934.700,00
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.979.700,00	49.934.700,00
5.01.01.2.09.0011.5	BELANJA DAERAH	59.979.700,00	49.934.700,00
5.01.01.2.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	59.979.700,00	49.934.700,00
5.01.01.2.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.979.700,00	49.934.700,00
5.01.01.2.09.0011.5.1.02.01	Belanja Barang	59.979.700,00	49.934.700,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.01.2.09.0011.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	59.979.700,00	
5.01.01.2.09.0011.5.1.02.01.0 1.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	59.979.700,00	1.171.099.331,00
			872.909.831,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.180.457.275,00	45.541.575,00
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	881.321.275,00	45.541.575,00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.555.575,00	45.541.575,00
5.01.02.2.01.0003.5	BELANJA DAERAH	45.555.575,00	45.541.575,00
5.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	45.555.575,00	16.805.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.555.575,00	16.805.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	16.805.000,00	8.605.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	16.805.000,00	1.500.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.605.000,00	2.800.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	3.900.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.800.000,00	1.800.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	1.800.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	-
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara, dan panitia	1.800.000,00	-
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	26.936.575,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	26.936.575,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.575,00	26.936.575,00
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.950.575,00	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.950.575,00	137.238.300,00
			137.238.300,00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	137.826.500,00	137.238.300,00
5.01.02.2.01.0004.5	BELANJA DAERAH	137.826.500,00	137.238.300,00
5.01.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	137.826.500,00	51.326.500,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.826.500,00	51.326.500,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	51.326.500,00	35.944.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.326.500,00	650.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.944.000,00	1.975.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	650.000,00	12.757.500,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.975.000,00	500.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.757.500,00	500.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.0 5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	500.000,00	85.411.800,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.0 5.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000,00	85.411.800,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	86.000.000,00	71.661.800,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.000.000,00	13.750.000,00
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.250.000,00	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.0 1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.750.000,00	288.784.200,00
			288.784.200,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	294.952.200,00	288.784.200,00
5.01.02.2.01.0005.5	BELANJA DAERAH	294.952.200,00	288.784.200,00
5.01.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	294.952.200,00	101.962.200,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.952.200,00	101.962.200,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	101.962.200,00	62.467.200,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	101.962.200,00	1.920.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.467.200,00	4.275.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.920.000,00	17.500.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.275.000,00	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0032	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	17.500.000,00	4.500.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0035	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	-	7.800.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.500.000,00	3.500.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	93.160.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	84.400.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.610.000,00	13.400.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.0 1	Belanja Jasa Kantor	84.400.000,00	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.0 1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.400.000,00	71.000.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.0 1.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.0 1.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	71.000.000,00	-



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	8.760.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	600.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.210.000,00	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	650.000,00	3.000.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	-	5.160.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	6.560.000,00	-
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset tatap lainnya	-	93.662.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	-	93.662.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	98.380.000,00	72.162.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.380.000,00	750.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.380.000,00	20.750.000,00
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.750.000,00	401.345.756,00
			401.345.756,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	402.987.000,00	401.345.756,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.01.0007.5	BELANJA DAERAH	402.987.000,00	401.345.756,00
5.01.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	402.987.000,00	165.883.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.987.000,00	165.883.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	165.883.000,00	91.523.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	165.883.000,00	9.000.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.523.000,00	30.000.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.000.000,00	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.000.000,00	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cindra Mata	-	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	35.360.000,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	-	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.360.000,00	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	-	-



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	Acara, dan Panitia		
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	235.462.756,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	235.462.756,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	237.104.000,00	235.462.756,00
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.104.000,00	-
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	237.104.000,00	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	69.969.650,00
			27.471.500,00
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.170.000,00	27.471.500,00
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	27.610.000,00	27.471.500,00
5.01.02.2.02.0002.5	BELANJA DAERAH	27.610.000,00	27.471.500,00
5.01.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	27.610.000,00	10.610.000,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	10.610.000,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	10.610.000,00	1.310.000,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.610.000,00	650.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	1.425.000,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	650.000,00	7.225.000,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.425.000,00	16.861.500,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.225.000,00	16.861.500,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.861.500,00
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.000.000,00	
5.01.02.2.02.0002.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000,00	42.498.150,00
			42.498.150,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	42.560.000,00	42.498.150,00
5.01.02.2.02.0003.5	BELANJA DAERAH	42.560.000,00	42.498.150,00
5.01.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	42.560.000,00	25.560.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	25.560.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	25.560.000,00	2.320.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	25.560.000,00	650.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	18.700.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	650.000,00	650.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.700.000,00	3.240.000,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	650.000,00	16.938.150,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	16.938.150,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.938.150,00
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.000.000,00	
5.01.02.2.02.0003.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000,00	228.219.850,00
			81.917.950,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	228.966.000,00	81.917.950,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	82.607.000,00	81.917.950,00
5.01.02.2.03.0001.5	BELANJA DAERAH	82.607.000,00	81.917.950,00
5.01.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	82.607.000,00	25.497.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.607.000,00	25.497.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	25.497.000,00	17.789.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	25.497.000,00	360.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.789.000,00	625.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000,00	-
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625.000,00	6.723.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	-	56.420.950,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.723.000,00	56.420.950,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.110.000,00	54.980.950,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.110.000,00	1.440.000,00
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.380.000,00	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	146.301.900,00
			146.301.900,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	146.359.000,00	146.301.900,00
5.01.02.2.03.0003.5	BELANJA DAERAH	146.359.000,00	146.301.900,00
5.01.02.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	146.359.000,00	71.789.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.359.000,00	71.789.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	71.789.000,00	36.549.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	71.789.000,00	1.915.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.549.000,00	11.825.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.915.000,00	3.425.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.825.000,00	18.075.000,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.425.000,00	74.512.900,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.075.000,00	74.512.900,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.570.000,00	74.512.900,00
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.570.000,00	
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.570.000,00	1.028.383.189,00
			482.586.539,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.037.182.600,00	28.591.800,00
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484.516.500,00	28.591.800,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28.739.500,00	28.591.800,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0001.5	BELANJA DAERAH	28.739.500,00	28.591.800,00
5.01.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.739.500,00	14.259.500,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.739.500,00	14.259.500,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	14.259.500,00	10.492.000,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.259.500,00	565.000,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.492.000,00	775.000,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	565.000,00	2.427.500,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	775.000,00	14.332.300,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.427.500,00	14.332.300,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.480.000,00	12.732.300,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.480.000,00	1.600.000,00
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	
5.01.03.2.01.0001.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	51.498.205,00
			51.498.205,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.692.500,00	51.498.205,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0003.5	BELANJA DAERAH	51.692.500,00	51.498.205,00
5.01.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	51.692.500,00	37.212.500,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.692.500,00	37.212.500,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	37.212.500,00	-
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.212.500,00	29.350.000,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	-	750.000,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.350.000,00	-
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000,00	750.000,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	6.362.500,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000,00	-
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.362.500,00	-
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	14.285.705,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0055	belanja jasa iklan/reklame,film,dan pemotretan	-	14.285.705,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	14.480.000,00	12.615.705,00
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.480.000,00	1.670.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	82.284.425,00
			82.284.425,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	83.494.500,00	82.284.425,00
5.01.03.2.01.0004.5	BELANJA DAERAH	83.494.500,00	82.284.425,00
5.01.03.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	83.494.500,00	25.800.500,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.494.500,00	25.800.500,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	25.800.500,00	20.003.000,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	25.800.500,00	805.000,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.003.000,00	625.000,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	805.000,00	4.367.500,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625.000,00	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.367.500,00	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02.0 1	Belanja Jasa Kantor	-	-



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02.0 1.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02.0 5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02.0 5.0009	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	-	56.483.925,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.02.0 5.0043	Belanja Sewa Hotel	-	56.483.925,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.694.000,00	56.483.925,00
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.694.000,00	-
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.694.000,00	
5.01.03.2.01.0004.5.1.02.04.0 1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	25.125.555,00
			25.125.555,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	25.195.000,00	25.125.555,00
5.01.03.2.01.0005.5	BELANJA DAERAH	25.195.000,00	25.125.555,00
5.01.03.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.195.000,00	10.715.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.195.000,00	10.715.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	10.715.000,00	4.173.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	10.715.000,00	730.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.173.000,00	1.000.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	730.000,00	4.812.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000,00	14.410.555,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.812.000,00	14.410.555,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.480.000,00	12.740.555,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.480.000,00	1.670.000,00
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	
5.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	15.437.000,00
			15.437.000,00
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.582.000,00	15.437.000,00
5.01.03.2.01.0007.5	BELANJA DAERAH	15.582.000,00	15.437.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	15.582.000,00	14.717.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.582.000,00	14.717.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	14.717.000,00	8.259.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	14.717.000,00	2.125.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.259.000,00	2.875.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.125.000,00	1.458.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.875.000,00	720.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.458.000,00	720.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	865.000,00	720.000,00
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	865.000,00	
5.01.03.2.01.0007.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	865.000,00	279.649.554,00
			279.649.554,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	279.813.000,00	279.649.554,00
5.01.03.2.01.0008.5	BELANJA DAERAH	279.813.000,00	279.649.554,00
5.01.03.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	279.813.000,00	140.363.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.813.000,00	140.363.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	140.363.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	140.363.000,00	88.731.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	3.235.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.731.000,00	5.075.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.235.000,00	39.722.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.075.000,00	3.600.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.722.000,00	2.100.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.0 1.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.600.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.100.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 1	Belanja Jasa Kantor	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 1.0030	Belanja Jasa Kebersihan	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 1.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 1.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 4.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 4.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 4.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	2.100.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 4.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	2.100.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 5	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.100.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 5.0009	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	2.100.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 5.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 5.0036	Belanja Sewa Taman	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 5.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	137.186.554,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.02.0 7.0028	Belanja Sewa Alat Musik	-	137.186.554,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	137.350.000,00	119.151.554,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137.350.000,00	18.035.000,00
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.260.000,00	-
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.090.000,00	
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.04.0 1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	314.808.450,00
			22.377.950,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	318.074.600,00	22.377.950,00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	22.434.500,00	22.377.950,00



	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
5.01.03.2.02.0001.5	BELANJA DAERAH	22.434.500,00	22.377.950,00
5.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.434.500,00	12.204.500,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.434.500,00	12.204.500,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	12.204.500,00	6.042.000,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	12.204.500,00	2.125.000,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.042.000,00	1.000.000,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.125.000,00	3.037.500,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000,00	10.173.450,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.037.500,00	10.173.450,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.230.000,00	8.485.950,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.230.000,00	1.687.500,00
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.500.000,00	
5.01.03.2.02.0001.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	17.405.500,00
			17.405.500,00
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	18.146.500,00	17.405.500,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
5.01.03.2.02.0003.5	BELANJA DAERAH	18.146.500,00	17.405.500,00
5.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	18.146.500,00	12.166.500,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.146.500,00	12.166.500,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	12.166.500,00	5.919.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	12.166.500,00	1.525.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.919.000,00	875.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000,00	3.847.500,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	875.000,00	5.239.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.847.500,00	5.239.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.980.000,00	3.576.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.980.000,00	1.663.000,00
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.250.000,00	
5.01.03.2.02.0003.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	169.054.200,00
			169.054.200,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	170.095.500,00	169.054.200,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
5.01.03.2.02.0004.5	BELANJA DAERAH	170.095.500,00	169.054.200,00
5.01.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	170.095.500,00	49.711.500,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.095.500,00	49.711.500,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	49.711.500,00	35.684.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	49.711.500,00	2.230.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.684.000,00	875.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.230.000,00	10.922.500,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	875.000,00	8.490.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.922.500,00	7.200.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.490.000,00	7.200.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02.0 1	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	1.290.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02.0 1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	350.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02.0 5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.290.000,00	940.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02.0 5.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	350.000,00	110.852.700,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.02.0004.5.1.02.02.0 5.0043	Belanja Sewa Hotel	940.000,00	110.852.700,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.894.000,00	107.652.700,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.894.000,00	3.200.000,00
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.694.000,00	
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.04.0 1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.200.000,00	44.173.500,00
			44.173.500,00
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	44.718.700,00	44.173.500,00
5.01.03.2.02.0005.5	BELANJA DAERAH	44.718.700,00	44.173.500,00
5.01.03.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	44.718.700,00	3.619.700,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.718.700,00	3.619.700,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	3.619.700,00	2.637.200,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	3.619.700,00	125.000,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.637.200,00	250.000,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	125.000,00	607.500,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	40.553.800,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.02.0005.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	607.500,00	40.553.800,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.099.000,00	38.003.800,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.099.000,00	2.550.000,00
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.504.000,00	
5.01.03.2.02.0005.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.595.000,00	21.243.000,00
			21.243.000,00
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.927.000,00	21.243.000,00
5.01.03.2.02.0007.5	BELANJA DAERAH	21.927.000,00	21.243.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	21.927.000,00	9.967.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.927.000,00	9.967.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	9.967.000,00	3.332.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	9.967.000,00	310.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.332.000,00	250.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.000,00	6.075.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	11.276.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.02.0007.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.075.000,00	11.276.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	11.960.000,00	7.836.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.960.000,00	3.440.000,00
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.500.000,00	
5.01.03.2.02.0007.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.460.000,00	40.554.300,00
			40.554.300,00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	40.752.400,00	40.554.300,00
5.01.03.2.02.0008.5	BELANJA DAERAH	40.752.400,00	40.554.300,00
5.01.03.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.752.400,00	4.027.400,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.752.400,00	4.027.400,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	4.027.400,00	2.502.400,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	4.027.400,00	310.000,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.502.400,00	1.215.000,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.000,00	36.526.900,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.215.000,00	36.526.900,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	36.725.000,00	33.966.900,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.02.0008.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.725.000,00	2.560.000,00
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.130.000,00	
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.595.000,00	230.988.200,00
			53.118.650,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	234.591.500,00	53.118.650,00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	53.541.000,00	53.118.650,00
5.01.03.2.03.0001.5	BELANJA DAERAH	53.541.000,00	53.118.650,00
5.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.541.000,00	6.462.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.541.000,00	6.462.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	6.462.000,00	1.107.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	6.462.000,00	245.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.107.000,00	250.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.000,00	4.860.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	46.656.650,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.03.0001.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000,00	46.656.650,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.079.000,00	42.396.650,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.079.000,00	4.260.000,00
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.754.000,00	
5.01.03.2.03.0001.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.325.000,00	6.374.000,00
			6.374.000,00
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.374.000,00	6.374.000,00
5.01.03.2.03.0003.5	BELANJA DAERAH	6.374.000,00	6.374.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.374.000,00	2.914.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.374.000,00	2.914.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	2.914.000,00	799.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	2.914.000,00	245.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.000,00	250.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.000,00	1.620.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	3.460.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.03.0003.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	3.460.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	3.460.000,00	3.460.000,00
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.460.000,00	
5.01.03.2.03.0003.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.460.000,00	49.338.350,00
			49.338.350,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	49.842.500,00	49.338.350,00
5.01.03.2.03.0004.5	BELANJA DAERAH	49.842.500,00	49.338.350,00
5.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	49.842.500,00	4.493.500,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.842.500,00	4.493.500,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	4.493.500,00	961.000,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	4.493.500,00	245.000,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	961.000,00	250.000,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.000,00	3.037.500,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	44.844.850,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.037.500,00	44.844.850,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.03.0004.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	45.349.000,00	42.249.850,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.349.000,00	2.595.000,00
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.754.000,00	
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.595.000,00	50.955.100,00
			50.955.100,00
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.732.000,00	50.955.100,00
5.01.03.2.03.0005.5	BELANJA DAERAH	52.732.000,00	50.955.100,00
5.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	52.732.000,00	5.652.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.732.000,00	5.652.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	5.653.000,00	4.192.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.653.000,00	120.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.193.000,00	125.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	1.215.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	45.303.100,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.215.000,00	45.303.100,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.03.0005.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	47.079.000,00	41.018.100,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.079.000,00	4.285.000,00
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.754.000,00	
5.01.03.2.03.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.325.000,00	12.161.000,00
			12.161.000,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.934.000,00	12.161.000,00
5.01.03.2.03.0007.5	BELANJA DAERAH	12.934.000,00	12.161.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	12.934.000,00	6.855.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.934.000,00	6.855.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	6.954.000,00	2.560.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.954.000,00	120.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.659.000,00	125.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	4.050.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	5.306.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000,00	5.306.000,00



LKJIP 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampung Barat

5.01.03.2.03.0007.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	5.980.000,00	3.576.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.980.000,00	1.730.000,00
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.250.000,00	
5.01.03.2.03.0007.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.730.000,00	59.041.100,00
			59.041.100,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.168.000,00	59.041.100,00
5.01.03.2.03.0008.5	BELANJA DAERAH	59.168.000,00	59.041.100,00
5.01.03.2.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	59.168.000,00	7.255.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.168.000,00	7.255.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	7.255.000,00	2.995.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.0 1	Belanja Barang Pakai Habis	7.255.000,00	240.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.995.000,00	375.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	3.645.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000,00	51.786.100,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.645.000,00	51.786.100,00



5.01.03.2.03.0008.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	51.913.000,00	49.306.100,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.04.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.913.000,00	2.480.000,00
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.318.000,00	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.595.000,00	
			5.747.558.147,00

Outcome dari PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bappeda) dengan target nilai Akuntabilitas Kinerja di tahun 2025 adalah 83,04 sedangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 memperoleh nilai 83,04 sehingga sudah mencapai target (100%).

Outcome PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH adalah Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja dengan target di tahun 2025 adalah 80%

Outcome PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah :

1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA dengan target 80%.
2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan target 80 %

Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.5.852.042.652,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.5.747.558.147,-** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 104.484.505,-**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semuapihak.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, program dan kegiatan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (Satu) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Dengan nilai masing masing sebagai berikut

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	poin	21,55	21,67	100
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP	poin	19,90	19,90	100

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Keberhasilan indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh *stakeholders* pembangunan di



Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2025 namun kendala tersebut sudah dapat diminimalisir sehingga untuk kedepan tidak ditemui kembali kendala yang sama.

Adapun untuk saran dan rekomendasi rencana kerja tahun depan adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan penajaman indikator agar lebih mencerminkan hasil nyata (misal : kualitas layanan dan daya saing) serta penetapan target yang berbasis evaluasi capaian historis dan potensi peningkatan kinerja;
- b. Memastikan penguatan mekanisme pengukuran melalui jadwal terstandar dan validasi data, serta penunjukan penanggung jawab pengumpulan dan pengolahan data kinerja;
- c. Memastikan rumusan tujuan/ sasaran dan indikator yang komprehensif menjawab isu strategis yang harus dikawal, berorientasi outcome, serta memenuhi indikator SMART dengan tetap mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- d. Menyempurnakan pohon kinerja yang memenuhi hubungan kausalitas dan prinsip logis, serta menggambarkan pemecahan masalah untuk kondisi yang ingin diwujudkan;
- e. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja dari tujuan/ sasaran strategis sampai pada penetapan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang;
- f. Memastikan IKU PD memiliki definisi operasional/ formulasi perhitungan dan sumber data yang relevan;
- g. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi saktiberkibar sebagai alat pengukuran kinerja serta menjadikan capaian kinerja organisasi dan individu sebagai salah satu dasar pemberian reward and punishment;
- h. Menganalisis faktor keberhasilan dan hambatan serta rekomendasi lebih mendalam dan konkret;
- i. Mendorong pemanfaatan pelaporan kinerja sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan target kinerja yang akan diperjanjikan;
- j. Kapasitas evaluator dalam evaluasi internal perlu ditingkatkan. Temuan dan rekomendasi harus menggambarkan kekurangan kemudian memberi solusi yang efektif;
- k. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian



reward and punishment kepada perangkat daerah. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Maret 2026

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ERIC ENRICO, S.Hut., MT

PEMBINA TK I

NIP. 197205051999031005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

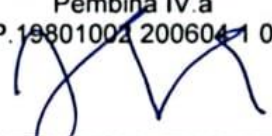
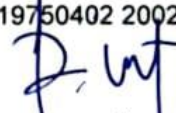
Jalan Tulip No. 01 Way Mengaku, Liwa 34811

Telepon/Fax : (0728) 21156

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR. 050/ 59/IV.03/2026

Kami telah mereviu laporan kinerja untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mengetahui, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Lampung Barat  ERIC ENRICO S. Hut., M.T PEMBINA TK.I 19720505 199903 1 005	Liwa Maret 2026 TIM Internal Reviu Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat	TTD
	<u>ARDHYANTO ADHAR, S.E., M.M</u> Pembina IV.a NIP. 19801002 200604 1 014 	
	<u>RIKA APRIYANTI, S.T, M, KM, M. Med. Sc</u> Pembina IV.a Nip. 19750402 200212 2 004 	
	<u>RUDI AGUS HERMAWAN, S.Si.M.A.P</u> Pembina IV.a Nip. 19880827 201101 1 001 	